

## ***Policy Brief***

# **Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan di Provinsi Banten**

**Mustahal, Adi Susanto, Ani Rahmawati, Muta Ali Khalifa, Ginanjar  
Pratama, Muhlisin, Rd. Rara Eulis Hendraswati, Guntur Fernando**

### **Ringkasan Eksekutif**

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ekosistem ini memiliki fungsi penting di berbagai sektor seperti ekologi, lingkungan, ekonomi, sosial, dan mitigasi bencana. Meskipun demikian, laju degradasi ekosistem mangrove yang tinggi akibat dari berbagai kegiatan manusia seperti deforestasi, alih fungsi lahan, pemanfaatan berlebih, erosi, sedimentasi, pencemaran maupun bencana alam menyebabkan kelestariannya semakin terancam. Kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan selayaknya sudah harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD serta pemerintah daerah Provinsi Banten. Namun demikian, evaluasi terhadap kebijakan tersebut juga perlu dilakukan guna mengoptimalkan arah dan capaian kebijakan selanjutnya. Evaluasi kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan diukur berdasarkan tingkat efektivitas kebijakan dan partisipasi masyarakat sehingga dapat diusulkan rekomendasi yang terarah dan dapat diimplementasikan di masa mendatang. Sinergitas antar OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk pengelolaan mangrove menjadi elemen kunci bagi keberhasilan pengelolaan mangrove berkelanjutan dengan melaksanakan rencana aksi terpadu sesuai kewenangannya. Selain itu, diperlukan adanya *leading sector* OPD sehingga seluruh program kerja dari mulai perencanaan, implementasi dan pengembangannya dapat terus berlanjut dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. di Provinsi Banten.

## **Pendahuluan**

Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Latuconsina 2018). Ekosistem mangrove di Provinsi Banten diperkirakan tersisa seluas 2.820,15 ha, tumbuh di kawasan hutan negara dan hutan rakyat. Luasan ekosistem mangrove di Provinsi Banten ada yang tumbuh dan berkembang baik pada satu lokasi, ada pula yang berkurang dan mengalami degradasi di lokasi lainnya. Beberapa faktor yang diduga kuat telah mempengaruhi berkurangnya luasan ekosistem mangrove adalah tingginya aktivitas manusia, terjadinya bencana alam, pemanenan kayu, okupasi, perambahan, terjadinya perubahan fungsi penggunaan lahan atau kawasan serta adanya abrasi pantai yang menggerus populasi mangrove. Faktor yang mempengaruhi terjaga atau berkembangnya ekosistem mangrove di suatu lokasi antara lain oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga keberadaan mangrove, keberhasilan program rehabilitasi yang dilaksanakan multi pihak, adanya tanah timbul karena proses akresi atau sedimentasi yang secara alami ditumbuhi jenis mangrove ataupun dipergunakan masyarakat untuk ditanami vegetasi mangrove (Setyawan & Sukman 2020).

Ekosistem Mangrove memiliki fungsi penting di berbagai sektor, sehingga pemulihan kawasan mangrove yang mengalami kerusakan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan harus dilakukan dengan kolaborasi berbagai OPD di Pemerintahan Provinsi Banten. Semua OPD tersebut harus bergandengan tangan untuk mendukung tercapainya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017-2022, serta mendukung RPJMN 2020-2024 dalam Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Berbagai regulasi yang sudah ditetapkan menjadi percuma bila tidak ada aksi nyata dalam pengelolaannya.

Upaya untuk mewujudkan misi tersebut tertuang dalam misi kelima Pemerintah Provinsi Banten 2017-2022 yaitu meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan tujuan daerah yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal". Upaya untuk mewujudkan misi tersebut melalui pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan

oleh beberapa OPD, seperti: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan lain-lain. Upaya pengelolaan mangrove yang sudah dilakukan salah satunya adalah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) pada tahun 2019 dengan tujuan menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Fungsi tersebut hanya dapat berjalan optimal melalui adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Peraturan Gubernur Banten 2019).

Dalam upaya memenuhi amanat tersebut, dalam Bab VI Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disebutkan bahwa Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung berupa perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang adalah mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai. Melalui upaya tersebut diharapkan ekosistem mangrove akan memberikan manfaat baik ekologi maupun ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Banten.

Dalam Bab II Dokumen RKPDP Provinsi Banten Tahun 2021, sebagai bagian dari Aspek Daya Saing Daerah terdapat amanat yang harus diselesaikan yaitu penyediaan lahan di Kota Serang yang akan digunakan sebagai lahan pengembangan Mangrove Center di Provinsi Banten serta pengembangan Tangerang Mangrove Center (TMC). Pada kenyataannya degradasi ekosistem Mangrove belum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu perlu dievaluasi efektivitas program/ kegiatan dan kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan di Provinsi Banten, agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat dicari solusinya dengan baik.

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi

kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

## **Pendekatan dan Metode**

Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juni 2021 melalui studi pustaka, observasi data dan *indepth interview* (wawancara mendalam) di wilayah administrasi Provinsi Banten yang memiliki ekosistem mangrove. Wilayah tersebut meliputi Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan evaluasi kebijakan mangrove meliputi data kondisi mangrove, data aktivitas dan pengelolaan terkait mangrove, data dan informasi terkait dengan peraturan dan kebijakan pengelolaan mangrove, serta data dan informasi terkait persepsi dan/atau pandangan pihak stakeholder terkait tentang kebijakan pengelolaan mangrove di Provinsi Banten.

Data kebijakan pengelolaan yang terhius dianalisis dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Fokus analisis yang dilakukan adalah (1) analisis efektifitas kebijakan pengelolaan mangrove yang mengacu pada teori Grindle (Salminah dan Alviya 2019) dengan tujuan perlindungan mangrove, peningkatan produksi perikanan, maupun kepentingan pemberdayaan masyarakat, (2) analisis partisipasi peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove, serta (3) analisis SWOT sebagai formulasi usulan/rekomendasi pengelolaan.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan mangrove berkelanjutan di Provinsi Banten maka rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Data luasan ekosistem mangrove yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan merujuk pada One Map Mangrove sehingga lebih valid dan up to date dalam mendukung arah kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan di Provinsi Banten.
2. Diperlukan monitoring dan evaluasi capaian kebijakan pengelolaan mangrove yang sudah dilakukan untuk menentukan efektivitas kebijakan dan mengetasi akar permasalahan yang dapat menghambat tercapaian tujuan pengelolaan yang ditetapkan.

3. Strategi pengelolaan mangrove berkelanjutan di Provinsi Banten yang diusulkan adalah:
  - Menyusun rencana aksi terpadu pengelolaan mangrove berkelanjutan di Provinsi Banten sebagai amanah dari RPJMN dan penguatan fungsi Banten Mangrove *Center* sehingga upaya pengelolaan mangrove menjadi lebih terarah dan mencapai target pengelolaan yang ditetapkan.
  - Merencanakan dan merealisasikan kegiatan penelitian, inventarisasi dan rehabilitasi terkait dengan mitigasi bencana tsunami terutama di wilayah barat dan selatan Banten, yang dilakukan oleh KKMD dan OPD terkait dengan menerapkan garis koordinasi yang jelas dari sejak penanaman, perawatan, hingga pemanfaatan.
  - Menyelaraskan program inventarisasi terkait data mangrove yang terpusat di satu OPD pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga program yang akan dilaksanakan bisa selaras, sehingga pengelolaan mangrove dapat terus berjalan secara berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.
  - Penguatan dan konsolidasi garis koordinasi pembagian kerja dalam pengelolaan mangrove daerah sebagai bentuk penguatan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, sehingga pelaksanaan pengelolannya tidak tumpang tindih dan dapat dikerjakan bersama-sama untuk mengatasi masalah ekologis, ekonomis dan mitigasi bencana (terutama tsunami).
4. Dalam rangka pengelolaan mangrove berkelanjutan di Provinsi Banten, maka diperlukan rencana aksi terpadu yang melibatkan semua OPD yang berkepentingan dalam pengelolaan kawasan mangrove yang terbagi ke dalam aspek ekologi, kelembagaan, politik dan kebijakan, ekonomi dan sosial. Rencana aksi terpadu diarahkan untuk peningkatan manfaat ekosistem mangrove dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi melalui penguatan aspek kelembagaan, politik dan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Banten.

## **Referensi**

- Keputusan Gubernur Banten. 2019. Keputusan Gubernur Banten Nomor 522.75.o5 I Kep.B1-Huk/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove daerah Provinsi Banten. Gubernur Banten. Serang
- Latuconsina H. 2018. Ekologi Perairan Tropis : Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Hayati perairan. Gadjah Mada University press. Yogyakarta.

Salminah M, Alviya I. 2019. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan mangrove Untuk Mendukung Mitigasi Perubahan iklim di Provinsi Kalimantan timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 16(1):11-29

Setyawan D, Sukman A. 2020. Pengaruh Abrasi dan Akresi terhadap Keberadaan Hutan Mangrove di Provinsi Banten. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Serang.